

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggung jawaban yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat tahun 2010 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat target sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2010 ini.

Dalam menentukan perhitungan akuntabilitas kinerja Inspektorat mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output, outcome.

a. Input :

- Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun 2010 didukung dengan dana sebesar Rp. 2,747,154,000,-

- SDM

SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebanyak 22 orang.

- Sarana

Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat adalah komputer, printer, note book dan kendaraan operasional.

- Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 21 obyek.

b. Output

Laporan Hasil Pengawasan ( LHA, LHE, LHR ) , prosentase capaian sasaran, isian format Tindak Lanjut dan Software pengembangan SIMWAS.

c. Outcome

Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) di BATAN

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Tahun 2010

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	1 ( satu ) Dokumen Satuan Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	1 draft pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi Satker yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi	80%  0%	Pedoman WBK masih menunggu penetapan dari Kepala Batan
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	80 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	95 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	100%	Dari 108 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti sebanyak 103 temuan sisanya sejumlah 5 temuan masih dalam proses.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 20 %	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 6,5%	100%	Dari 108 temuan hasil pemeriksaan, terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara
	4	Jumlah dokumen audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	21 ( dua puluh satu ) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	24 ( dua puluh empat ) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	114%	Dokumen audit berjumlah 17 LHA sesuai PKPT tahun 2010 dan 7 LHA PKPT tahun 2009
	5	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan revidi Laporan Keuangan unit kerja di BATAN	4 ( empat ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen revidi Laporan Keuangan di BATAN	3 ( tiga ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen revidi Laporan Keuangan di BATAN	75% LHE 100% LHR	Dokumen LHE : - Pusdiklat - PATIR - PRSG - PKTN ( masih dalam proses ) Dokumen LHR : - Revidi Laporan Keuangan tahun 2009 - Revidi Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2010

## 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran

### 3.2.1 Sasaran 1

#### **Jumlah Dokumen Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.**

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpenggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* khususnya di lingkup BATAN salah satunya dengan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu unit kerja. Kriteria WBK pada suatu unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas pokok, disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pendeklarasian status suatu unit kerja di lingkup BATAN sebagai wilayah bebas dari korupsi. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal. Pada institusi Inspektorat sendiri melekat suatu tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup BATAN, yang turut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir di Indonesia. Penetapan status suatu unit kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai wilayah bebas dari korupsi.

Pada tahun 2010 Inspektorat belum dapat mencapai target yang direncanakan, yaitu terbentuknya 1 wilayah Bebas dari korupsi, perkembangan terakhir baru sampai pada tahap penyusunan draft pedoman pembentukan wilayah bebas dari korupsi yang masih menunggu penetapan dari Kepala BATAN, sehingga tingkat capaian kegiatan sebesar 80 % untuk penyusunan pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi dan 0 % untuk Satker yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

**Kesimpulan :**

Target tahun 2010 : 1 ( satu ) Dokumen Satuan Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK

Realisasi tahun 2010 : - 80% untuk pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi  
- 0% untuk Satker yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

**3.2.2 Sasaran 2**

**Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.**

Kegiatan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan tindak lanjut serta penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK adalah sama - sama melakukan kegiatan untuk memberikan jawaban atau penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan , dan yang membedakan adalah pelaksanaan tindak lanjut, baik dalam form pengisian maupun dalam laporan hasil pemeriksaan (eksternal dan internal)

Tahapan evaluasi tindak lanjut , rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK dalam laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2010 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana

tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK.

Dari 108 temuan eksternal maupun internal yang terdapat pada tahun 2010 telah ditindaklanjuti sebanyak 103 temuan sisanya sejumlah 5 temuan masih dalam proses. Dengan demikian capaian prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan internal dan eksternal sebesar 95 %. Capaian tersebut telah melampaui target yang direncanakan sebesar 80%.

### **Kesimpulan :**

Secara umum tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dapat tercapai 100%, dituangkan dalam 1 bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian sasaran ini mendukung capaian indikator outcome pada Penetapan Kinerja “ persentase ( % ) tindak lanjut seluruh rekomendasi internal dan eksternal atas Laporan Hasil Audit “ dan “ persentase ( % ) unit kerja yang menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP ) dan internal BATAN “ pada Penetapan Kinerja Inspektorat.

Target tahun 2010 :80 % penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.

Realisasi tahun 2010 :95% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.

### **3.2.3 Sasaran 3**

#### **Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.**

Sampai saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum teratasi secara tuntas. Hal ini sering menjadi sorotan berbagai lembaga internasional bahwa praktek KKN di Indonesia masih berada pada peringkat atas. Masalah ini bahkan telah memasuki ruang lingkup instansi pemerintah, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan mengingat tugas pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan mengganggu moral sekaligus kinerja aparat pemerintahan serta

menjadi tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Jenis temuan pemeriksaan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Kasus yang merugikan negara
2. Kewajiban menyetor kepada negara
3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan
4. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
5. Penyimpangan dari ketentuan anggaran
6. Hambatan terhadap kelancaran proyek
7. Hambatan terhadap tugas pokok
8. Kelemahan administrasi
9. Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
10. Temuan pemeriksaan lainnya

Pada tahun 2010 jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara hanya berjumlah 7 temuan dari total 108 temuan pemeriksaan atau sebesar 6,5%. Persentase jumlah temuan ini masih berada dibawah target maksimum yang direncanakan yaitu 20%

**Kesimpulan:**

Target sasaran Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 20 % dapat tercapai 100%

Target tahun 2010 : 0 – 20 % persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar

Realisasi tahun 2010 : 6,5 % jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

**3.2.4 Sasaran 4**

**Jumlah Dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN.**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor: 392/KA/XI/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Inspektorat melaksanakan audit dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mencakup penilaian kecukupan pengendalian manajemen, kecukupan

prosedur, keekonomisan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber dana dan daya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala kebijakan dan prosedurnya. Secara rinci tujuan audit Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- b. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan mengukur efektivitas pelaksanaan program;
- c. Menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektifitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. Menilai kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi beserta aspek penunjangnya yaitu aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek metode kerja. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dengan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.

Pada tahun 2010, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan yaitu sebanyak 21 unit kerja dengan penerbitan LHA sebanyak 24 dokumen LHA ( 7 LHA PKPT tahun 2009 dan 17 LHA PKPT tahun 2010 )

**Kesimpulan :**

Secara umum sasaran audit kinerja dapat tercapai 100%, dituangkan dalam bentuk 24 laporan hasil audit. Dengan demikian sasaran ini mendukung capaian indikator outcome pada Penetapan Kinerja “ persentase ( % ) unit kerja yang meningkat akuntabilitas kinerjanya “

Target tahun 2010 : 21 Laporan Hasil Audit

Realisasi tahun 2010 : 24 Laporan Hasil Audit

### 3.2.5 Sasaran 5

#### **Jumlah Dokumen evaluasi kinerja dan dokumen reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN.**

- Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat difokuskan pada evaluasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Evaluasi LAKIP merupakan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja di BATAN. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi.

Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Pada tahun 2010, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi LAKIP terhadap 4 unit kerja yaitu Pusdiklat, PATIR, PRSG dan PKTN dengan hasil penilaian rata – rata di atas nilai 50, dan LHE yang telah diterbitkan sebanyak 3 LHE.

Evaluasi kinerja ini mendukung capaian outcome pada Penetapan Kinerja “ persentase ( % ) peningkatan kinerja di unit kerja BATAN dengan nilai 50 “

- Tahapan rewiu laporan keuangan meliputi perencanaan rewiu, pelaksanaan rewiu, dan pelaporan rewiu. Tahap perencanaan rewiu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk meyeleksi dan menentukan objek rewiu, proses penyelenggaraan akuntansi dan akun LK K/L yang akan direwiu, dan pemilihan langkah – langkah rewiu. Tahap pelaksanaan rewiu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit rewiu, serta penyusunan Kertas Kerja Rewiu. Tahap pelaporan rewiu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Rewiu, Ikhtisar hasil Rewiu, dan laporan hasil Rewiu, yang dilajjukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA dengan tingkat UAPA.

Pada tahun 2010, Inspektorat telah melaksanakan 2 kali rewiu yaitu rewiu laporan keuangan tahun 2009 dan rewiu laporan keuangan semester 1 ( pertama ) tahun 2010.

#### **Kesimpulan :**

Secara umum evaluasi kinerja dan rewiu laporan keuangan dapat tercapai 100%, dituangkan dalam bentuk 3 laporan hasil evaluasi dan 2 laporan hasil rewiu. Dengan demikian sasaran ini mendukung capaian indikator outcome pada Penetapan Kinerja “ persentase ( % ) tindak lanjut seluruh rekomendasi atas review Laporan Keuangan BATAN “ dan “ persentase ( % ) unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil review laporan keuangan BATAN “

Target tahun 2010 : 6 Laporan

Realisasi tahun 2010 : 5 Laporan

### **3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan**

Hingga akhir tahun 2010, Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun capaian kegiatan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

### **Sasaran utama**

Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN

Dalam mendukung sasaran utama tersebut, Inspektorat ditunjang beberapa kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP dan reviu Laporan Keuangan**

Sub kegiatan 1				
Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
		Laporan	25	29
Pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP dan reviu Laporan Keuangan	output : Jumlah LHA,LHE dan LHR			

Jumlah LHA yang telah diterbitkan selama tahun 2010 berjumlah 24 LHA dengan rincian sebagai berikut:

LHA Tahun anggaran 2008 dan 2009 :

No.	Nama Obrik	Penerbitan LHA
1	PTAPB	018/ISP.A/I/2010, tgl 25 Januari 2010
2	PPIN	019/ISP.A/II/2010, tgl 17 Pebruari 2010
3	PKTN	020/ISP.D/III/2010, tgl 5 Maret 2010
4	KANTOR PUSAT	022/ISP.C/V/2010, tgl 26 Mei 2010
5	PPEN	022/ISP.C/V/2010, tgl 31 Mei 2010
6	PPGN	024/ISP.A/VI/2010, tgl 1 Juni 2010
7	INSPEKTORAT	025/ISP.A/VII/2010, tgl 1 Juli 2010

LHA Tahun 2010:

No.	Nama Obrik	Realisasi	Penerbitan LHA
1	PTRKN	08 Feb 2010	001/ISP.C/IV/2010 tgl 26 Apr 2010
2	PTBN	08 Feb 2010	002/ISP.D/IV/2010 tgl 27 Apr 2010
3	PTLR	02 Mar 2010	006/ISP.B/VII/2010 tgl 2 Juli 2010

4	PRPN	15 Mar 2010	007/ISP.A/VII/2010 tgl 14 Juli 2010
5	PSJMN	14 Apr 2010	003/ISP.D/VI/2010 tgl 02 Juni 2010
6	PUSDIKLAT	14 Apr 2010	004/ISP.C/VI/2010 tgl 14 Juni 2010
7	PTKMR	18 Mei 2010	017/ISP.A/XII/2010 tgl 20 Desember 2010
8	PATIR	18 Mei 2010	009/ISP.B/IX/2010 tgl 23 September 2010
9	PRR	14 Juni 2010	014/ISP.C/XI/2010 tgl 04 November 2010
10	PTBIN	14 Juni 2010	010/ISP.D/IX/2010 tgl 28 September 2010
11	PPIN	26 Juli 2010	011/ISP.B/X/2010 tgl 08 Okt 2010
12	PPEN	18 Agust 2010	018/ISP.D/XII/2010 tgl 29 Desember 2010
13	PRSG	18 Agust 2010	016/ISP.C/XII/2010 tgl 02 Desember 2010
14	PTNBR	11 Okt 2010	015/ISP.A/XI/2010 tgl 22 November 2010
15	STTN	04 Okt 2010	012/ISP.C/X/2010 tgl 26 Oktober 2010
16	PTAPB	04 Okt 2010	013/ISP.B/XI/2010 tgl 03 November 2010
17	PPGN	01 Nov 2010	020/ISP.B/XI/2010 tgl 31 Desember 2010

Jumlah LHE yang diterbitkan pada tahun 2010 sebanyak 3 LHE sedangkan hasil reviu sebanyak 2 LHR dengan rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2010:

No.	Nama OBRİK	Realisasi	Penerbitan LHA
1	Reviu LK BATAN	17 Feb 2010	R-124/WP.00/ISP.2/2010
2	Reviu LK BATAN	6 Agustus2010	R-389/WP.00/ISP.2/2010
3	Evaluasi LAKIP PDL	14 Apr 2010	008/ISP.B/VIII/2010
4	Evaluasi LAKIP PATIR	18 Mei 2010	005/ISP.D/VI/2010
5	Evaluasi LAKIP PRSG	18 August 2010	019/ISP.A/XII/2010

**Kesimpulan :**

Secara umum target pada kegiatan ini dapat tercapai 100%. Meskipun masih terdapat laporan yang masih dalam proses penyelesaian ( LHE dan LHR )

Target tahun 2010 : sebanyak 25 Laporan

Realisasi tahun 2010 : sebanyak 29 Laporan ( 24 LHA, 3 LHE, 2 LHR )

**2. Pembinaan Auditor melalui diklat JFA dan pengelola administrasi melalui diklat lain sesuai kompetensi yang diperlukan**

Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
Pembinaan Auditor melalui diklat JFA dan pengelola administrasi melalui diklat lain sesuai kompetensi yang diperlukan	output : Jumlah sertifikat diklat	Sertifikat	6	10

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa diklat dan seminar yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai Inspektorat.

No.	Nama Peserta	Nama Diklat/Seminar	Tanggal Diklat/seminar	Tempat
1.	Asridah	Diklat Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2005	5-8 April 2010	Pusdiklat Batan
2.	Feri Kustiani, A.Md	Diklat Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2005	5-8 April 2010	Pusdiklat Batan
3.	Retnani Angganingsih, SE	Orientasi Pegawai Baru	1-5 Mei 2010	Pusdiklat Batan
4.	Enrico Endy Siagian, SE	Workshop PJB Secara Elektronik	10 Mei 2010	BU Batan
5.	Tuty arwanih	Workshop PJB Secara Elektronik	10 Mei 2010	BU Batan
6.	Dra. Ratri Wahyuni Pratiwi	Seminar sistem Manajemen Keamanan Kawasan Nuklir utk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat	20 Mei 2010	PSJMN Batan
7.	Ridwan, SH	Diklat Sertifikasi Penjenjangan Dalnis	3-18 Mei 2010	BPKP Ciawi Bogor
8.	Dra. Ratri WP	Seminar PPI-PDITN Tahun 2010	20 Juli 2010	PTAPB Yogyakarta
9.	Drs.Syamsudin	Seminar Nasional Keselamatan Nuklir TKPFN ke 16	28 Juli 2010	PTRKN ( Surabaya)
10.	Kriswanto, SE	Seminar Nasional Keselamatan Nuklir TKPFN ke 16	28 Juli 2010	PTRKN ( Surabaya )
11.	Tanti Susanti	Workshop Open Source	29 Juli 2010	PPIN Serpong

		<b>Software</b>		
<b>12</b>	<b>Retnani Dwi Angganingsih</b>	<b>Workshop Open Source Software</b>	<b>29 Juli 2010</b>	<b>PPIN Serpong</b>
13	Dra. Ratri WP	Seminar Uji Publik RUU ttg Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah	29 Juli 2010	KN PAN (Yogyakarta)
14	Chaerudin	Seminar Uji Publik RUU ttg Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah	29 Juli 2010	KN PAN (Yogyakarta)
15	Dra. Ratri WP	Seminar Nasional Pengawasan “Peransistem Whistle Blowing dlm pandangan internal auditor Pemerintah”	3 Agustus 2010	APIP BAPPENAS
16	Dra. Ratri WP	Seminar Membangun Sinergitas Arsitektur Pengawasan Nasional yg efektif dalam rangka Indonesian Goodgovernance	21 September 2010	BPKP
<b>17</b>	<b>Retnani Dwi Angganingsih, SE</b>	<b>Prajab Tk III Reguler tahun 2010</b>	<b>3 s/d 16 Okt 2010</b>	<b>PPMKP Deptan, Ciawi Bogor</b>
18	Dra. Ratri Wahyuni Pratiwi	Seminar Membangun Sinergitas Arsitektur pengawasan Nasional yang Efektif dalam rangka Indonesian Good Governance	27 Okt 2010	Balai Kartini, Jakarta
19	Epi Wk	Seminar Desktop Publiship menggunakan GIMP	27 Okt 2010	PPIN Serpong
20	Asridah	Seminar Desktop Publiship menggunakan GIMP	27 Okt 2010	PPIN Serpong
21	Enrico Endy Siagian, SE	Seminar Desktop Publiship menggunakan GIMP	27 Okt 2010	PPIN Serpong
22	Ahmad Tarmizi	Pertemuan Ilmiah tentang Pengembangan dan Integritasi Sistem Informatika d Batan	1 Des 2010	PPIN Serpong
23	Drs. Syamsudin	Pertemuan Ilmiah tentang Pengembangan dan Integritasi Sistem Informatika d Batan	1 Des 2010	PPIN Serpong
24	Kusrini	Pertemuan Ilmiah tentang Pengembangan dan Integritasi Sistem Informatika d Batan	1 Des 2010	PPIN Serpong
<b>25</b>	<b>Wasgiyono, SH</b>	<b>Diklat PABK</b>	<b>1-2 Des 2010</b>	<b>DEPKEU Bogor</b>

### **Kesimpulan :**

Secara umum kegiatan ini dapat tercapai 100%.

Target tahun 2010 : 6 sertifikat

Realisasi tahun 2010 : 10 sertifikat

### **3. Pengadaan Peralatan dan Mesin**

Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin	output : Jumlah Notebook	Unit	3	3

Inspektorat melalui tim pengadaan barang dan jasa pada tahun 2010 telah mengadakan 3 unit laptop yang dipergunakan sebagai media presentasi dan penyusunan hasil temuan.

### **Kesimpulan :**

Target pengadaan peralatan dan mesin sebanyak 3 unit notebook dapat tercapai 100%

### **4. Pembinaan dan Evaluasi Hasil - hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut**

Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
Pembinaan dan Evaluasi Hasil - hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	output : - Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan  - Jumlah pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK )	Laporan	1	1
		Dokumen	1 Dokumen	1 draft pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi
		Satker	1 Satker	0

#### **a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan:**

Kegiatan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan tindak lanjut serta penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK adalah sama - sama melakukan kegiatan untuk memberikan jawaban atau penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan , dan yang membedakan adalah pelaksanaan tindak

lanjut, baik dalam form pengisian maupun dalam laporan hasil pemeriksaan (eksternal dan internal)

Tahapan evaluasi tindak lanjut, rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK dalam laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2011 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK

**Kesimpulan :**

Secara umum tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat tercapai 100%, dituangkan dalam 1 bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Target tahun 2010 : 1 Laporan

Realisasi tahun 2010 : 1 Laporan

**b. Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi :**

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* khususnya di lingkup BATAN salah satunya dengan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu unit kerja. Kriteria WBK pada suatu unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas pokok,

disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pendeklarasian status suatu unit kerja di lingkup BATAN sebagai wilayah bebas dari korupsi. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal. Pada institusi Inspektorat sendiri melekat suatu tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup BATAN, yang turut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir di Indonesia. Penetapan status suatu unit kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai wilayah bebas dari korupsi.

**Kesimpulan :**

Pada tahun 2010 Inspektorat belum dapat mencapai target yang direncanakan, yaitu terbentuknya 1 wilayah Bebas dari korupsi, pada tahun 2010 baru sampai pada tahap penyusunan pedoman pembentukan wilayah bebas dari korupsi, sehingga tingkat capaian kegiatan sebesar 0%

Target tahun 2010 : 1 ( satu ) Dokumen Satuan Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK

Realisasi tahun 2010 : - 80% untuk pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi  
- 0% untuk Satker yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

**5. Pengembangan Sistem Informasi**

Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
Pengembangan Sistem Informasi	output : Jumlah Laporan pelaksanaan program sistem informasi pengawasan.	Laporan	1	1

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang dititik beratkan pada evaluasi implementasi pelaksanaan SIMWAS dilaksanakan oleh Tim Inspektorat, serta kegiatan ini berlangsung selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2010 melalui beberapa sub kegiatan berikut:

1. Entry data referensi pengawasan serta data perencanaan pengawasan tahunan.
2. Entry data program kerja audit ( PKA ) serta kertas kerja audit ( KKA )
3. Entry data konfirmasi hasil audit serta laporan hasil audit.
4. Entry data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada awal pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan dimulai dengan memperbaharui data referensi pengawasan serta program kerja pengawasan tahunan yang dilaksanakan pada triwulan pertama, data tersebut dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan selama satu tahun berjalan. Program kerja tersebut mencakup pelaksanaan pemeriksaan operasional rutin serta evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada triwulan 2,3 dan 4 kegiatan telah memasuki tahapan memperbaharui PKA, KKA, rincian temuan serta laporan hasil audit yang waktunya disesuaikan dengan Program kerja yang telah disusun pada triwulan pertama. Data tersebut diperbaharui serta di input ke dalam database sistem informasi manajemen pengawasan oleh masing – masing auditor sebagai dokumen pribadi yang datanya tersimpan dalam database sistem, namun tetap dapat diakses oleh auditor lain secara berjenjang untuk dapat dievaluasi dan diberikan rekomendasi.

### **Kesimpulan :**

Laporan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan telah disusun sebanyak 1 Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara umum kegiatan tersebut telah terlaksana 100% baik dari segi dana maupun dari segi kegiatan.

Target tahun 2010 : 1 Laporan pengembangan simwas.

Realisasi tahun 2010 : 1 Laporan pengembangan simwas.

## 5. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4

Uraian	indikator kerja	satuan	target	realisasi
Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 4	output : Jumlah Kendaraan bermotor roda 4	Unit	1	1

Inspektorat melalui tim pengadaan barang dan jasa pada tahun 2010 telah mengadakan 1 kendaraan bermotor roda 4 yang dipergunakan sebagai media transportasi oleh auditor dan tata usaha dalam menjalankan tugas – tugasnya.

### Kesimpulan :

Kegiatan ini telah mencapai 100%

Target tahun 2010 : 1 unit kendaraan bermotor roda 4

Realisasi tahun 2010 : 1 unit kendaraan bermotor roda 4

## 3.4 Akuntabilitas Capaian Anggaran

### ANGGARAN (DIPA) INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KODE	KEGIATAN	DIPA	REALISASI	PROSEN TASE
1	2	3	4	5	6
<i>I</i>	<b>01.01.09</b>	<b>PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK</b>			
<b>1</b>	<b>0001</b>	<b>PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI</b>			
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	692.988.000	690.878.020	99.70
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	15.587	97.42
	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	59.072.000	57.324.320	97.04
	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	14.544.000	15.137.938	104.08
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	49.270.000	49.270.000	100.00
	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	101.535.000	106.035.000	104.43
	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	28.317.000	34.829.463	123.00
	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	33.565.000	44.973.000	133.99

	511129	Belanja Uang Makan PNS	126.720.000	70.259.750	55.44
	511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	197.886.000	197.490.000	99.80
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.960.000	11.775.000	98.45
	512211	Belanja Uang Lembur	11.836.000	11.648.000	98.41
<b>2</b>	<b>0002</b>	<b>PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN</b>			
<b>3</b>	<b>0024</b>	<b>PENGADAAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/ UANG MAKAN PNS</b>			
	521113	Belanja penambahan daya tahan tubuh	36.000.000	35.954.500	99.87
<b>4</b>	<b>0025</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN</b>			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.800.000	4.508.000	93.92
<b>5</b>	<b>0032</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</b>			
	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	470.000	470.000	100.00
<b>6</b>	<b>0256</b>	<b>PERBAIKAN PERALATAN KANTOR</b>			
	523121	Belanja Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	6.840.000	6.838.000	99.97
<b>7</b>	<b>0926</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR</b>			
	532111	Belanja modal peralatan dan mesin	10.000.000	10.000.000	100.00
<b>8</b>	<b>1138</b>	<b>PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/ 6/ 10</b>			
	523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	32.700.000,-	32.534.000	99.49
	532121	Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin	7.935.000	7.900.000	99,56
<b>9</b>	<b>2005</b>	<b>PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2</b>			
	523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	3.000.000	2.998.300	99.94
<b>10</b>	<b>4863</b>	<b>OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN</b>			
	521111	Belanja keperluan perkantoran	66.000.000	65.995.000	99.99
	521115	Honor terkait operasional satker	51.700.000	51.700.000	100,00
<b>11</b>	<b>0003</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK/ BIROKRASI</b>			
	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	16.880.000	15.854.000	93.92

	524111	Belanja perjalanan biasa	9.120.000	9.070.000	99.45
<b>12</b>	<b>0051</b>	<b>PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/ TEKNIS/ PROGRAM</b>			
	521211	Belanja bahan	17.155.000	17.144.840	99.94
	521213	Honor terkait output kegiatan	6.400.000	6.400.000	100,00
	524111	Belanja perjalanan biasa	36.900.000	36.780.000	99.67
<b>13</b>	<b>0056</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN</b>			
	521119	Belanja barang operasional lainnya	30.000.000	30.000.000	100
	521211	Belanja bahan	19.375.000	19.367.250	99,96
	524111	Belanja perjalanan biasa	410.625.000	410.422.200	99,95
<b>14</b>	<b>0084</b>	<b>EVALUASI/ LAPORAN KEGIATAN</b>			
	521211	Belanja bahan	17.800.000	17.780.800	99.89
	524111	Belanja perjalanan biasa	49.200.000	49.200.000,-	100,00
<b>15</b>	<b>0085</b>	<b>PENYELENGGARAAN RECAMAH/ DISKUSI/ SEMINAR/ SARASEHAN</b>			
	521211	Belanja bahan	21.300.000	21.296.900	99.99
<b>16</b>	<b>0088</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KERJA/ DINAS/ PIMPINAN/ KELOMPOK KERJA/ KONSULTASI</b>			
	521211	Belanja bahan	20.000.000	19.999.400	100.00
	524111	Belanja perjalanan biasa	143.045.000,-	143.027.000	99,99
<b>17</b>	<b>0095</b>	<b>IKLAN/ PENGUMUMAN / PEMBERITAHUAN</b>			
	521219	Belanja barang non operasional lainnya	2.200.000	2.200.200	100.00
<b>18</b>	<b>0084</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATUR NEGARA/ INTERNAL</b>			
<b>19</b>	<b>0057</b>	<b>PEMBINAAN DAN EVALUASI HASIL-HASIL PEMERIKSAAN (LHP) DAN TINDAK LANJUT.</b>			
	521211	Belanja bahan	11.500.000	11.497.600	99,98
	521213	Honor terkait output kegiatan	54.800.000	54.800.000	100.00
	522115	belanja jasa profesi	9.100.000	8.800.000	96.70
	524119	Belanja perjalanan lainnya	38.800.000	38.781.000	99.95
	532111	Belanja modal peralatan dan mesin	20.000.000	20.000.000	100.00
<b>20</b>	<b>0290</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4</b>			

	532111	Belanja modal peralatan dan mesin	240.000.000	231.825.000	96.59
<b>21</b>	<b>0656</b>	<b>PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>			
	521211	Belanja bahan	6.400.000	6.397.050	99.95
	524119	Belanja perjalanan lainnya	19.400.000	19.330.000	99.64
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.747.154.000</b>	<b>2.698.506.928</b>	<b>98,23</b>

#### A. Perbandingan kinerja dengan tahun yang lalu.

Perbandingan capaian sasaran Inspektorat pada tahun 2009 dan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

- **Perbandingan capaian sasaran**

#### Capaian sasaran pada tahun 2009.

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya pemeriksaan administrasi personel, keuangan dan perlengkapan, evaluasi laporan kegiatan pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut serta pengembangan sistem informasi manajemen ( SIM ) audit	Jumlah laporan penyelenggaraan pemeriksaan pengawasan dan tindak lanjut serta pengembangan sistem informasi yang mampu memberikan rekomendasi dan perbaikan kinerja.	25 laporan ( 24 laporan pengawasan dan tindak lanjut dan 1 laporan SIM )	25 laporan ( 24 laporan pengawasan dan tindak lanjut dan 1 laporan SIM )	100	

## Capaian Sasaran pada Tahun 2010.

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	1 ( satu ) Dokumen Satuan Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	1 draft pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi Satker yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi	80%	Pedoman WBK masih menunggu penetapan dari Kepala Batan
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	80 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	95 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	100%	Dari 108 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti sebanyak 103 temuan sisanya sejumlah 5 temuan masih dalam proses.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 20 %	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 6,5%	100%	Dari 108 temuan hasil pemeriksaan, terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara
	4	Jumlah dokumen audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	21 ( dua puluh satu ) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	24 ( dua puluh empat ) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	114%	Dokumen audit berjumlah 17 LHA sesuai PKPT tahun 2010 dan 7 LHA PKPT tahun 2009
	5	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN	4 ( empat ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	3 ( tiga ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	75% LHE 100% LHR	Dokumen LHE : - Pusdiklat - PATIR - PRSG - PKTN ( masih dalam proses ) Dokumen LHR : - Reviu Laporan Keuangan tahun 2009 - Reviu Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2010

### Kesimpulan:

Untuk kualitas sasaran untuk tahun 2010 mengalami peningkatan dikarenakan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama. Sedangkan capaian sasaran untuk tahun 2010

mengalami penurunan dikarenakan ada satu sasaran yang belum tercapai yaitu penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi.

- **Perbandingan capaian kegiatan**

**Capaian Kegiatan tahun 2009 dan tahun 2010**

Uraian	Indikator Kerja	Tingkat Capaian ( Target )	Realisasi	Tingkat Capaian ( Target )	Realisasi
		2009		2010	
Kegiatan					
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara	output : - Jumlah Laporan Internal dan tindak lanjut  - Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK )	24 Laporan  -	24 laporan  -	25 Laporan  1 Satker	30 laporan  0
Pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP dan reviu Laporan Keuangan	output : Jumlah LHA,LHE dan LHR	24 Laporan	24 laporan	25 Laporan	29 Laporan
Pengembangan Sistem Informasi	output : Jumlah Laporan pelaksanaan program sistem informasi pengawasan.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

**Kesimpulan :**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kegiatan pokok Inspektorat pada tahun 2010 secara umum telah mencapai 100% bahkan ada yang melebihi target serta adanya kegiatan baru yaitu pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh satuan kerja di BATAN.